

Senin, 16 November 2009

[Berita Utama](#) | [Bisnis & Keuangan](#) | [Humaniora](#) | [International](#) | [Opini](#) | [Politik & Hukum](#) | [Sosok](#) | [Nama & Peristiwa](#) | [Nusantara](#) | [Metropolitan](#) | [Olahraga](#) | [Sumatera Bagian Selatan](#) | [Sumatera Bagian Utara](#) | [Yogyakarta](#) | [Lepas](#)

HKI Dipertanyakan

[Indonesia Minta APEC Lebih Konkret Lihat Persoalan](#)

Senin, 16 November 2009 | 04:09 WIB

Singapura, Kompas - Para pengusaha Amerika Serikat mempertanyakan lagi masalah perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Indonesia kembali masuk Daftar Pengawasan Prioritas Amerika Serikat sebagai negara yang tidak melindungi kekayaan intelektual.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan bilateral Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dengan Menteri Perdagangan AS Gary Locke dan Perwakilan Dagang AS Ron Kirk di Singapura, di sela-sela pertemuan tingkat tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Sabtu (14/11).

Pada 1 Mei 2009 Perwakilan Dagang AS (USTR) menempatkan Indonesia dalam daftar hitam pelanggar hak kekayaan intelektual (HKI) bersama Kanada dan Aljazair. Negara yang masuk daftar tersebut antara lain Rusia dan China. Padahal, dua tahun sebelumnya Indonesia keluar dari Daftar Pengawasan Prioritas (Priority Watch List) dan masuk ke Daftar Pengawasan (Watch List).

Namun, USTR menilai, hanya sedikit kemajuan yang dicapai Indonesia dalam perlindungan HKI sejak 2006. Padahal, negara-negara di Asia Tenggara lainnya sudah membuat langkah yang menjanjikan.

Menurut Mari, penilaian USTR itu tidak semuanya benar. Namun, pemerintah memasukkan perbaikan status itu sebagai sasaran kerja prioritas target kerja satu tahun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Mari, menghendaki perbaikan itu sebagai salah satu fokus utama yang harus diselesaikan segera.

"Sebagai calon investor, wajar mereka mempertanyakan segala hal. Kami mengatakan, memang masih banyak yang harus diselesaikan, tetapi selalu ada kemajuan yang dilakukan," ujarnya.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, Indonesia menyampaikan kepada AS serius memperbaiki kondisi ekonomi riilnya. Sebab, AS pasar ekspor Indonesia yang besar.

Akibat krisis keuangan akhir 2008, kontribusi ekspor Indonesia ke AS turun dari 12 persen tahun 2008 menjadi 9,5 persen tahun 2009.

Lebih konkret

Di Forum APEC, Mari menjelaskan, Indonesia meminta agar APEC lebih konkret melihat permasalahan ekonomi anggotanya. Masalah yang dihadapi 21 anggota APEC bukan hanya peningkatan akses dan fasilitasi perdagangan, tetapi juga peningkatan kapasitas para pelaku usahanya.

"Kami meminta APEC jangan memikirkan perdagangan dan fasilitasi saja. APEC memiliki kaki ketiga, peningkatan kapasitas," tuturnya.

Dia menjelaskan, APEC sebaiknya membuat program yang lebih membumi. "Dalam kondisi krisis, kebutuhan akan program yang riil makin besar. Saat ini, kami lihat, program yang ada pada APEC terbatas pada seminar," kata Mari.

(Orin basuki dari Singapura)

Share on Facebook

- Beri Rating Artikel -

Rate

A A A  

Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini. [Posting komentar Anda](#)

Uba Ingan Sigalingging @ Senin, 16 November 2009 | 14:41 WIB

Bgmana mungkin kebijakan APEC membumi kalau kalau konsepnya berasal dari World Bank dan WTO?

Rusdiah@APWKomitel @ Senin, 16 November 2009 | 09:17 WIB

memang RI sepatutnya menanyakan pada delegasi AS mengenai laporan HKI yg tidak fair & menyerumuskan kita ke priority watch list. Daripada ribut putaran DOHA ?

1

Form Komentar

Nama *

Email Address *

Komentar *